

**IMPLEMENTASI SURAT KEPUTUSAN WALIKOTA BUKITTINGGI
NOMOR 188.45-210-2023 TENTANG “BALING BAMBU” SEBAGAI
STRATEGI PERCEPATAN PENGENTASAN KEMISKINAN DAERAH
TAHUN 2023**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Mencapai Gelar Sarjana Ilmu Politik pada Fakultas Ilmu
Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas*

Oleh :

SALWA ABELIA FAJAR PANGGABEAN

BP : 2110831028



Dosen Pembimbing :

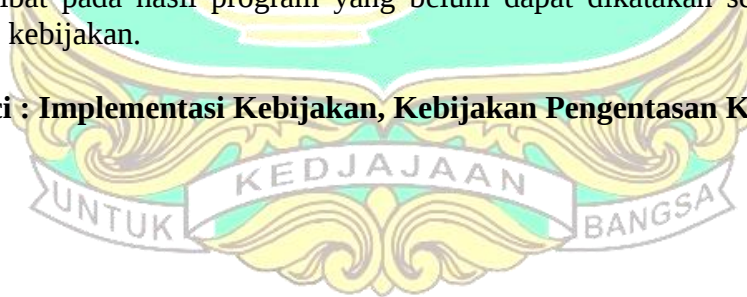
- 1. Prof. Dr. Asrinaldi, M.Si**
- 2. Dr. Irawati, MA**

**DEPARTEMEN ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2025**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Program Baling Bambu sebagai salah satu strategi pengentasan kemiskinan di Kota Bukittinggi. Fokus utama dalam kebijakan ini diarahkan pada pelaksanaan kebijakan yang dijalankan oleh aktor-aktor pelaksana, yakni Dinas Sosial Kota Bukittinggi, BPRS Jam Gadang, BAZNAS Kota Bukittinggi, LKKS Kota Bukittinggi, serta Keluarga Pioneer yang turut berkontribusi dalam mendukung keberhasilan program. Penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Daniel Mazmanian dan Paul A. Sabatier sebagai pisau analisis, yang menekankan pada tiga variabel yaitu : (1) Mudah atau tidaknya masalah yang akan digarap, (2) kemampuan kebijakan dalam membangun proses implementasi secara tepat, serta (3) Variabel di luar kebijakan yang mempengaruhi proses implementasi. Metode yang digunakan ialah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan dokumentasi. Hasil penelitian yang ditemukan memperlihatkan bahwa keterlibatan para aktor pelaksana memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keberhasilan program, terutama dengan komitmen yang dijalankan berdasarkan pada *MoU* dan SOP yang jelas, serta dukungan publik terhadap keberlangsungan Program Baling Bambu. Namun, dalam proses implementasi kebijakan masih menghadapi berbagai kendala dari sisi pelaksana seperti lemahnya koordinasi antar pemerintah dengan *stakeholder*, ketidakjelasan pemberdayaan keluarga *pioneer*, ketidakakuratan data rekapitulasi penerima manfaat, ketidaksesuaian antara isi kebijakan dengan praktik yang dilakukan di lapangan, keterbatasan anggaran serta dinamika politik seperti pergantian kepala daerah yang berdampak terhadap keberlanjutan program. Sementara dari sisi masyarakat, ditemukan adanya sikap ketergantungan dan penyalahgunaan manfaat yang berakibat pada hasil program yang belum dapat dikatakan sesuai dengan tujuan awal kebijakan.

Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, Kebijakan Pengentasan Kemiskinan



ABSTRACT

This study aims to analyse the implementation of the Baling Bambu Program as a strategy for poverty alleviation in Bukittinggi City. The primary focus is on the execution of the policy by implementing actors, namely the Bukittinggi City Social Affairs Office, BPRS Jam Gadang, BAZNAS Bukittinggi City, LKKS Bukittinggi City and Pioneer Families, who contribute to the program's success. This research employs the policy implementation theory proposed by Daniel Mazmanian and Paul A. Sabatier as the analytical framework, which emphasizes three key variables : (1) the tractability of the problem being addressed, (2) the ability of the policy to establish an effective implementation process, and (3) external factors influencing implementation. The method used is descriptive qualitative, with data collected through in depth interviews and documentation. The findings reveal that the involvement of implementing actors significantly affects the success of the programs., particularly through clear commitments based on MoU and SOP, along with strong public support for the continuation of the Baling Bambu Program's. However, the implementation process still faces several obstacles, including weak coordination between the government and stakeholders, unclear empowerment mechanisms for Pioneer Families, inaccurate beneficiary data, inconsistencies between policy content and actual field practices, limited funding, and political dynamics such as changes in local leadership that impact the program's sustainability. From the community side, issues such as dependency and misuse of program benefits have led to outcomes that have yet to fully align with the original policy objectives.

Keywords: Policy Implementation, Poverty Alleviation Policy.

